



DINAMIKA SISTEM KOSEKI: PENGARUH BUDAYA DAN MODERNISASI TERHADAP PERKAWINAN DI JEPANG

Laila Rahma Agusriyani¹, Nurun Nida Waddiny², Anwar Hafidzi³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: lailarahmaagusriyani@gmail.com¹, Nurunnidawaddiny@gmail.com², anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id³

Received 12-04-2025 | Revised form 15-05-2025 | Accepted 18-06-2025

Abstract

The koseki system (family registry) in Japan records detailed information based on the family as the fundamental unit, rather than the individual. It originated during the Meiji Restoration as a tool for taxation and military conscription. The evolution of marriage in Japan has shifted from clan-based alliances to personal, romantic decisions, although traditional values remain deeply rooted. Patriarchal culture strongly influences family naming and marriage practices, with the majority of couples adopting the husband's surname (*fufudosei*), and the *ie* system granting ultimate authority to the head of the household. Modernization has led to declining birth and marriage rates, as more women prioritize careers or postpone marriage. The *fufubessei* movement (separate surnames for married couples) has gained momentum due to its implications for women's careers and personal identity. These changes reflect a shift toward individualism and nuclear families, although traditional norms still exert significant influence.

Keywords: Koseki System, Family Registry, Culture, Modernization, Marriage, Japan

Abstrak

Sistem koseki (registrasi keluarga) di Jepang mencatat informasi detail keluarga sebagai unit dasar, bukan individu, dan berakar dari Restorasi Meiji untuk pajak dan pendaftaran militer. Evolusi pernikahan di Jepang beralih dari penyatuan klan menjadi keputusan pribadi romantis, meskipun nilai tradisional tetap kuat. Budaya patriarki sangat memengaruhi sistem nama keluarga dan perkawinan, dengan mayoritas pasangan menggunakan nama suami (*fufudossei*) dan sistem *ie* memberikan otoritas tertinggi pada kepala keluarga. Modernisasi menyebabkan penurunan angka kelahiran dan pernikahan, karena wanita lebih memilih karier atau menunda pernikahan. Gerakan *fufubessei* (nama keluarga terpisah) menguat karena kerugian bagi perempuan dalam karier dan identitas pribadi. Perubahan ini mencerminkan pergeseran menuju individualisme dan keluarga inti, meskipun tradisi masih berpengaruh kuat.

Kata Kunci: Sistem *Koseki*, Registrasi Keluarga, Budaya, Modernisasi, Perkawinan, Jepang.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Jepang telah mengalami perubahan sosial dan demografi yang signifikan, ditandai dengan penurunan tingkat kelahiran, peningkatan usia pernikahan, dan penurunan jumlah pernikahan secara keseluruhan. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan cara pandang wanita Jepang terhadap pernikahan, di mana banyak yang kini lebih memilih

berkarier, menunda pernikahan untuk menikmati hidup sendiri, atau merasa kesulitan secara ekonomi untuk memelihara rumah tangga setelah menikah. Isu ini juga diperparah oleh berkurangnya daya tarik keuntungan dari pernikahan dan meningkatnya preferensi untuk tetap tinggal bersama orang tua.

Selain itu, sistem registrasi keluarga Jepang, yang dikenal sebagai *koseki*, juga menghadapi tantangan di tengah modernisasi dan meningkatnya individualisme. Sistem *koseki* secara historis telah berfungsi sebagai dasar keteraturan keluarga di Jepang, mencatat informasi detail anggota keluarga dan berakar pada era Restorasi Meiji untuk mempermudah pengumpulan pajak dan pendaftaran militer. Namun, kritik terhadap sistem ini semakin menguat karena dianggap kurang mengakomodasi keberagaman bentuk keluarga dan individu.

Salah satu perdebatan utama dalam konteks ini adalah kewajiban penggunaan nama keluarga yang sama bagi pasangan menikah (*fufudossei*), yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sistem *ie* (keluarga/rumah tangga patrilineal) di Jepang. Meskipun secara teori pasangan dapat memilih nama suami atau istri, mayoritas pasangan menikah di Jepang menggunakan nama suami, mencerminkan dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Gerakan yang mendukung nama keluarga terpisah bagi perempuan setelah menikah (*fufubessei*) semakin menguat, menyoroti kerugian yang dialami perempuan dalam karier dan identitas pribadi, serta masalah ketidaknyamanan akibat perubahan dokumen resmi.

Pergeseran nilai ini, yang mencerminkan dampak modernisasi, mengubah struktur keluarga dari keluarga besar tradisional menjadi keluarga inti yang lebih kecil. Konsekuensi dari penurunan angka kelahiran menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap kelangsungan keluarga dan tenaga kerja nasional, serta kemungkinan pengikisan nilai-nilai konvensional terkait pranata *ie* dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam tentang sistem *koseki* di Jepang, pengaruh budaya terhadap perkawinan, dan bagaimana modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika keluarga dan perkawinan di Jepang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam sistem *koseki* (registrasi keluarga) di Jepang dan pengaruh budaya terhadap perkawinan, serta dampaknya terhadap modernisasi masyarakat Jepang.

Pengumpulan data melalui penelusuran dan analisis dokumen, artikel ilmiah, buku, jurnal, dan sumber-sumber relevan lainnya yang membahas sistem *koseki* di Jepang. Sumber-sumber yang digunakan mencakup undang-undang, publikasi akademis, dan laporan penelitian terkait Jepang.

Dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara sistem *koseki*, budaya, dan perubahan dalam perkawinan di Jepang. Kemudian hasil

analisis disajikan secara deskriptif dan naratif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang isu-isu yang dibahas, dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk membangun argumen dan kesimpulan yang koheren.

PEMBAHASAN

1. Sistem Koseki (Registrasi Keluarga)

Sistem *koseki* adalah sistem registrasi keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Registrasi Keluarga Jepang (*koseki ho*). Sistem ini berfungsi sebagai dasar keteraturan yang mencerminkan aspek kebiasaan dan susunan keluarga di Jepang. Unit dasar registrasi dalam *koseki* bukanlah individu, melainkan rumah tangga (Azhar: 2005). Setiap suami dan istri yang terdaftar di suatu distrik, kota, atau desa, serta anak-anak yang memiliki nama keluarga yang sama, harus memiliki daftar keluarga yang tercatat. Jika daftar keluarga baru dibuat untuk seseorang yang menikah dengan warga negara asing atau seseorang yang tidak memiliki pasangan, daftar keluarga tersebut juga harus mencakup orang tersebut dan anak-anak yang memiliki nama keluarga yang sama.

Koseki mencatat berbagai informasi detail tentang setiap anggota keluarga, termasuk jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, status kekerabatan, perkawinan, dan perceraian. Informasi ini disimpan di kantor kecamatan (Azhar: 2005). Setiap daftar keluarga, selain mencantumkan lokasi tempat tinggal yang terdaftar, harus ada informasi lain yang menyebutkan rincian tentang setiap anggota keluarga tersebut seperti:

- a. Nama lengkap;
- b. Tanggal lahir;
- c. Penyebab seseorang dimasukkan dalam daftar keluarga dan tanggal masuk;
- d. Nama lengkap orang tua kandung dan hubungan pribadinya dengan orang tua kandung;
- e. Jika seseorang adalah anak angkat, nama lengkap orang tua angkatnya dan hubungan pribadinya dengan orang tua angkatnya;
- f. Pernyataan suami atau istri jika suami dan istri (buku nikah);
- g. Sehubungan dengan seseorang yang telah masuk dalam daftar keluarga dari yang lain, indikasi dari daftar keluarga yang terakhir;
- h. Hal-hal lain yang ditentukan oleh Peraturan Kementerian Kehakiman.

Dilihat dari sisi historisnya, aturan sistem nama keluarga mulai diberlakukan pada zaman Restorasi Meiji, di mana terdapat sistem *koseki*, yang berarti sistem registrasi keluarga di mana masyarakat Jepang wajib mendaftarkan anggota keluarga dengan nama keluarga yang sama secara administratif guna mempermudah pengumpulan pajak dan mengatur pendaftaran militer. Menurut Sumiko Hoshino, sistem *koseki* terus-menerus melakukan perbaikan dan diberlakukan bersama dengan KUHPerdara sehingga menetapkan larangan pendaftaran tiga generasi, hanya terbatas pada anggota keluarga, yaitu orang tua dan anak-anak yang memiliki nama keluarga yang

sama (Desty, dkk: 2023). Apabila ada perubahan status anggota keluarga, seperti kelahiran, kematian, perceraian, atau adopsi, pihak yang bersangkutan wajib melaporkannya. Perubahan ini dikategorikan sebagai "pemberitahuan perubahan" atau "sosetsuteki todokete" (Azhar: 2005).

2. Struktur keluarga dan administrasi kependudukan di Jepang

- a. Pernikahan dan Daftar Keluarga: Jika ada pemberitahuan pernikahan, maka daftar keluarga baru harus dibuat untuk suami dan istri. Namun, jika dalam daftar keluarga sebelumnya suami memiliki nama keluarga yang sama dengan keluarga suami, atau istri dengan nama keluarga yang sama dengan keluarga istri, tidak perlu membuat daftar keluarga baru.
- b. Perubahan Nama Keluarga Setelah Menikah: Jika istri mengambil nama keluarga suaminya, maka istri akan dimasukkan dalam daftar keluarga suami. Sebaliknya, jika suami mengambil nama keluarga istri, maka suami akan dimasukkan dalam daftar keluarga istri.
- c. Pernikahan dengan Warga Negara Asing: Jika ada pernikahan antara warga negara Jepang dan warga negara asing, daftar keluarga baru akan dibuat untuk warga negara Jepang. Namun, jika warga negara Jepang sudah terdaftar sebagai orang pertama dalam daftar keluarga, maka tidak perlu membuat daftar keluarga baru.

Selain Pengaruh mendalam dari pendaftaran rumah tangga administratif dimulai dengan diperkenalkannya sistem pendaftaran rumah tangga Tiongkok, yang merupakan bagian utama dari Reformasi Besar (*Taika*) yang dimulai pada tahun 646 Masehi. Sistem ini segera disesuaikan dengan kondisi dan tujuan Jepang kontemporer, dan salah satu hasil utamanya adalah reorganisasi tatanan sosial.

Selama periode Edo (1603–1868), inspeksi sektarian awal (*shūmōn aratame chō* 宗門改長) dan sensus (*ninbetsu chō* 人別帳) yang mendaftarkan populasi berdasarkan unit rumah tangga. Dengan Restorasi Meiji yang dimulai pada tahun 1868, sistem *koseki* secara formal didirikan. Menurut Mukai dan pakar *koseki* perintis Toshitani Nobuyoshi, sistem *koseki* modern berkembang menjadi "elemen yang sangat diperlukan dalam pembentukan fondasi dasar sistem hukum perdata". Ini menjadi sistem wajib bagi pendaftaran anggota keluarga dengan nama keluarga yang sama secara administratif, terutama untuk tujuan pengumpulan pajak dan pendaftaran militer. Secara khusus, hal ini terjadi karena sistem *koseki* dan unit 'Ko' (「戸」單位) yang berkembang selama awal Meiji merupakan matriks bagi keluarga tipe *lie*' yang dilembagakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1898, yang selanjutnya memengaruhi bagian-bagian hukum keluarga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1899 dan Undang-Undang Kewarganegaraan.

Pemeriksaan register *koseki* modern relevan, karena tiga alasan. Pertama, pendaftaran *koseki* dan perolehan kewarganegaraan saling terkait sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan 1899. Kedua, dari tahun 1871 hingga saat ini, register rumah

tangga modern secara konsisten merupakan register warga negara Jepang (*nihon kokumin tōrokubo* 日本国民登簿). Ketiga, pendaftaran sebagian besar warga negara baru terjadi di tingkat rumah tangga melalui pemberitahuan kelahiran (*shusshō todoke ide* 出所届出), yang berarti bahwa pendaftaran ini mungkin menjadi prioritas kedua setelah strategi pembentukan keluarga yang lebih mendesak seperti mencegah pendaftaran anak tidak sah (Karl: 2014).

Aturan-aturan dasar mengenai penyusunan dan pendaftaran dalam sistem *koseki* berdasarkan Undang-Undang *Koseki* tahun 1947: (Karl: 2014)

- a. *Koseki* baru akan disusun bagi setiap suami istri yang mendirikan *honseki* di distrik kota, kota kecil atau desa dan bagi anak-anak mereka yang memiliki nama keluarga yang sama. Namun, dalam kasus seseorang yang menikah dengan orang non-Jepang (selanjutnya disebut 'orang asing') atau orang yang tidak memiliki pasangan, *koseki* akan disusun untuk orang tersebut dan anak-anaknya yang memiliki nama keluarga yang sama. (pasal 6) Anak yang mengambil nama marga ayah dan ibunya, wajib masuk *koseki* ayah dan ibunya.
- b. Kecuali dalam hal tersebut di atas, anak yang memakai nama marga ayahnya akan masuk dalam *koseki* ayahnya, dan anak yang memakai nama marga ibunya akan masuk dalam *koseki* ibunya.
- c. Anak angkat wajib mencatatkan nama anak angkatnya dalam *koseki* (pasal 18). Jika pencatatan baru dalam *koseki* dilakukan bagi orang yang belum tercatat dalam *koseki*, maka pencatatan baru harus dilakukan bagi orang tersebut, kecuali bagi orang yang mencatatkan nama anak angkatnya dalam *koseki* ayah atau ibunya. (pasal 22)

3. Pengaruh Budaya Terhadap Perkawinan Evolusi Pernikahan di Jepang

Konsep pernikahan di Jepang telah mengalami transformasi mendalam selama berabad-abad. Pada zaman dahulu, pernikahan sering kali berfungsi untuk menyatukan klan dan mempertahankan garis keturunan keluarga. Selama era feodal, pernikahan menjadi lebih terstruktur, yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang termiliterisasi. Para wanita diharapkan meninggalkan keluarga mereka untuk bergabung dengan rumah tangga suami mereka, melahirkan anak-anak untuk mengamankan masa depan klan. Dalam beberapa kasus, pernikahan diatur untuk aliansi politik, dengan sedikit memperhatikan pilihan pribadi.

Periode Edo (1603–1868) memperkenalkan cita-cita Konfusianisme, yang menekankan bakti kepada orang tua dan struktur keluarga hierarkis. Perjudohan (*omiai*) menjadi norma, dan pernikahan sering diatur oleh keluarga agar selaras dengan kepentingan sosial dan ekonomi. Namun, kekakuan ikatan ini terkadang menimbulkan ketidakpuasan, yang mendorong beberapa orang mencari pelipur lara di luar pernikahan mereka, meskipun ada hukuman berat bagi perzinahan.

Karena sistem kasta pada periode Edo sangat ketat, pernikahan bersifat endogami dan berdasarkan kelas. Namun, merupakan hal yang umum bagi anggota kelas *shogun* dan kelas *daimyo* untuk menikah, karena kedua kelas tersebut berada dalam strata sosial yang sama. Garis keturunan bersifat patriarki sehingga pengantin perempuan menikah dengan keluarga mempelai pria. Pernikahan bersifat monogami tetapi jumlah kebebasan seksual antara kedua jenis kelamin sangat tidak proporsional. Keperawanan wanita saat menikah dianggap sangat penting di kelas atas dan wanita dilarang mengambil pasangan seksual tambahan setelah menikah. Di sisi lain, pria berkedudukan tinggi diizinkan untuk mengambil selir atau wanita lain yang belum menikah. Namun, wanita kelas bawah tidak terikat erat oleh adat istiadat yang ketat saat itu dan memiliki lebih banyak kebebasan dalam hal kekuasaan dalam pernikahan (Adat Pernikahan Zaman Edo).

Reformasi pasca-Perang Dunia II membawa perubahan besar pada pernikahan di Jepang. Konstitusi baru mengabadikan prinsip pernikahan sebagai keputusan bersama antara seorang pria dan seorang wanita, terlepas dari pengaruh keluarga. Pergeseran ini menandai pergerakan menuju individualisme dan kemitraan romantis, meskipun nilai-nilai tradisional masih berlaku dalam banyak aspek kehidupan pernikahan. Dengan demikian, Pernikahan di Jepang telah berkembang dari alat untuk menyatukan klan dan menjaga garis keturunan menjadi sebuah keputusan pribadi yang melibatkan hubungan romantis, meskipun nilai-nilai tradisional masih mempengaruhi banyak aspek kehidupan pernikahan (Tanuki Stories From Japan).

Budaya patriarki memiliki pengaruh kuat dalam sistem nama keluarga dan perkawinan di Jepang. Sejak zaman Restorasi Meiji, aturan sistem nama keluarga mewajibkan pasangan yang sudah menikah untuk menggunakan nama keluarga yang sama (*fufudossei*). Meskipun secara teori nama suami atau istri dapat dipilih, dalam kenyataannya sekitar 96% pasangan menikah di Jepang menggunakan nama suami. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa laki-laki memegang kendali kekuasaan di setiap bidang kehidupan, termasuk perkawinan (Desty, dkk: 2023).

Sistem *ie* (家), yang berarti "keluarga" atau "rumah tangga" dalam konteks sistem kekerabatan patrilineal, juga sangat memengaruhi pola keluarga di Jepang. Dalam sistem *ie*, kepala keluarga (*kacho*), yang umumnya adalah ayah atau suami, memiliki kekuasaan dan otoritas tertinggi. Keputusan penting dalam keluarga, termasuk pemilihan pasangan untuk dinikahi, berada di tangan kepala keluarga (Tesa Metalika: 2014). Perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dan seringkali tidak memiliki hak untuk membuat keputusan bebas mengenai hidup mereka. Ini terlihat dari fakta bahwa perempuan seringkali tidak ditanyai pendapatnya dalam perjodohan dan harus mematuhi apa yang diperintahkan.

Selain itu, ajaran Konfusianisme dan budaya samurai turut memperkuat dominasi patriarki. Perempuan diharapkan untuk berbakti kepada orang tua, suami, dan anak laki-laki mereka. Pendidikan perempuan pada masa itu terbatas pada urusan rumah tangga,

seperti manajemen keuangan rumah tangga (*kasei*), dan pekerjaan di luar rumah dianggap tidak pantas. Konsep *Ryousaikenbo* (良妻賢母), yang berarti "istri yang baik dan ibu yang bijaksana", merupakan suatu sebutan bagi perempuan Jepang yang mampu mengurus dan menjaga serta merawat keluarga, anak serta suami mereka dengan baik. Dengan kata lain, tugas perempuan seumur hidup hanyalah mengurus rumah tangga. Perempuan yang mengenyam pendidikan merupakan hal yang percuma dan akan mengubah mereka menjadi istri yang buruk (Tesa Metalika: 2014).

4. Modernisasi dan Perubahan dalam Perkawinan di Jepang

Jepang mengalami perubahan sosial dan demografi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Tingkat kelahiran menurun, usia pernikahan meningkat, dan jumlah pernikahan menurun. Selain itu, semakin banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan berkarir, yang mengubah dinamika tradisional dalam keluarga dan perkawinan. Salah satu penyebab utama rendahnya angka pernikahan di Jepang adalah karena munculnya perubahan cara pandang wanita Jepang terhadap pernikahan. Dewasa ini banyak wanita Jepang yang lebih memilih berkarier daripada menikah. Banyak juga wanita Jepang yang menunda pernikahan dikarenakan senang menikmati hidup sendiri selama masih muda. Banyak wanita Jepang yang berpikir secara ekonomi susah memelihara rumah tangga setelah menikah. Mereka juga berfikir tidak merasakan daya tarik akan keuntungan dari menikah. Berubahnya kesadaran masyarakat mengenai usia menikah. Bertambahnya orang yang merasa lebih bersemangat bekerja daripada menikah. Kemungkinan besar kehilangan pekerjaan setelah menikah. Berkurangnya orang yang diminta tolong untuk pernikahan sehingga kurangnya kesempatan untuk bertemu. Lebih menyenangkan hidup dengan orang tua (Budi Mulyadi: 2018).

Meskipun budaya tradisional masih kuat, modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pandangan masyarakat Jepang terhadap sistem nama keluarga dan perkawinan. Gerakan untuk mempertahankan nama keluarga perempuan setelah menikah (*fufubessei*) semakin menguat di tengah tren sosial baru yang ditandai dengan beragam nilai dan pandangan tentang keluarga.

Gerakan pendukung *fufubessei* berargumen bahwa keharusan penggunaan nama keluarga yang sama merugikan perempuan, terutama dalam karier dan identitas pribadi. Mereka juga menyoroti masalah ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh perubahan dokumen resmi setelah menikah, seperti daftar keluarga, paspor, akun bank, surat izin mengemudi, asuransi, dan stempel pribadi yang biasa digunakan sebagai tanda tangan di Jepang. Perempuan cenderung merasa tidak adil karena hanya mereka yang harus menghadapi prosedur rumit seperti itu. Meninjau sistem sosial yang mapan. Secara garis besar perubahan nama keluarga dirasa banyak merugikan perempuan dan menginginkan untuk merevisi undang-undang yang berlaku, hal

berkaitan erat dengan feminisme yang bertujuan memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta kebebasan dan hak-hak individu (Desty, dkk: 2023).

Modernisasi juga telah mengubah pandangan tentang pernikahan itu sendiri. Fenomena *bankonka* (wanita yang menikmati menjadi wanita karir), semakin berdaya dan memilih untuk hidup sendiri. dan *hikonka* memilih tidak punya anak atau (memilih tidak menikah) semakin meningkat di Jepang, yang menyebabkan penurunan angka kelahiran (*shoshika*). Perubahan ini menunjukkan bahwa individu, terutama wanita, semakin menghargai kemandirian dan karier mereka, bahkan jika itu berarti menunda atau memilih untuk tidak menikah. Pergeseran nilai ini mencerminkan dampak modernisasi yang mengubah struktur keluarga dari keluarga besar tradisional menjadi keluarga inti yang lebih kecil. Dengan menurunnya angka kelahiran di Jepang, akan muncul masalah-masalah terkait proses pewarisan hak dan kewajiban keluarga yang membutuhkan penerus (anak) laki-laki, dan jalan keluar yang dilakukan kemungkinan mengandung pengikisan nilai-nilai konvensional mengenai pranata *ie* dalam keluarga di Jepang (Widiyanti & Dewi: 2021).

Dalam konteks hukum waris, sistem tradisional Jepang sebelum Perang Dunia II mewariskan semua aset kepada anak laki-laki tertua, sementara anak laki-laki yang lebih muda, anak perempuan, dan pasangan yang ditinggalkan tidak memiliki hak waris. Namun, setelah reformasi hukum pasca Perang Dunia II, sistem ini diubah karena dianggap tidak demokratis dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Sekarang, harta warisan dibagikan di antara pasangan yang ditinggalkan, anak laki-laki, dan anak perempuan. Meskipun demikian, hak waris anak yang tidak sah masih separuh dari anak yang sah, yang terus menjadi sumber kritik karena dianggap melegalkan diskriminasi (Azhar: 2005).

Di sisi lain, pria juga enggan menikah karena tanggung jawab yang tinggi sebagai kepala keluarga, membuat mereka hanya fokus pada karier (Widiyanti & Dewi: 2021). Kekhawatiran akan kemungkinan kehilangan pekerjaan setelah menikah, berkurangnya kesempatan untuk bertemu calon pasangan, dan preferensi untuk hidup dengan orang tua juga berkontribusi pada fenomena ini. Konsekuensi dari penurunan angka kelahiran ini adalah kekhawatiran mendalam terhadap kelangsungan keluarga (terutama pewaris laki-laki) dan tenaga kerja nasional.

Meskipun demikian, budaya tradisional masih memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Jepang. Banyak pasangan yang masih menghargai nilai-nilai keluarga dan harmoni, dan praktik seperti *omiai* masih tetap ada, meskipun mungkin dengan adaptasi modern. Perkawinan di Jepang modern merupakan hasil interaksi yang kompleks antara tradisi dan modernitas. Modernisasi dan individualisme yang semakin meningkat di Jepang menimbulkan tantangan terhadap sistem *koseki* dan pandangan tradisional terhadap perkawinan. Kritik terhadap sistem *koseki* yang dianggap kurang mengakomodasi keberagaman bentuk keluarga dan individu semakin menguat. Selain itu, generasi muda Jepang semakin menekankan pada kebebasan individu dan

kesetaraan gender dalam hubungan perkawinan, yang menantang norma-norma tradisional (Lie & John: 2003).

5. KESIMPULAN

Sistem *koseki* (registrasi keluarga) di Jepang berfungsi sebagai dasar keteraturan yang mencerminkan aspek kebiasaan dan susunan keluarga, di mana unit dasarnya adalah rumah tangga, bukan individu. Sistem ini mencatat informasi detail anggota keluarga seperti jenis kelamin, tanggal lahir, nama orang tua, status kekerabatan, perkawinan, dan perceraian, dan disimpan di kantor kecamatan. Secara historis, sistem nama keluarga mulai berlaku pada zaman restorasi Meiji bersamaan dengan sistem *koseki* untuk mempermudah pengumpulan pajak dan mengatur pendaftaran militer.

Konsep pernikahan di Jepang telah berevolusi dari fungsi penyatuan klan dan pemeliharaan garis keturunan menjadi keputusan pribadi yang didasarkan pada hubungan romantis, meskipun nilai-nilai tradisional masih kuat. Budaya patriarki sangat memengaruhi sistem nama keluarga dan perkawinan di Jepang, di mana pasangan wajib menggunakan nama keluarga yang sama (*fufudossei*), dengan mayoritas memilih nama keluarga suami. Sistem *ie* (keluarga/rumah tangga patrilineal) juga memberikan otoritas tertinggi kepada kepala keluarga, membatasi hak perempuan dalam pengambilan keputusan. Ajaran Konfusianisme dan budaya samurai juga memperkuat dominasi patriarki, dengan perempuan diharapkan berbakti dan fokus pada urusan rumah tangga.

Modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pandangan masyarakat Jepang terhadap sistem nama keluarga dan perkawinan. Terjadi penurunan tingkat kelahiran, peningkatan usia pernikahan, dan penurunan jumlah pernikahan, sebagian besar karena perubahan cara pandang wanita Jepang yang lebih memilih berkarier dan menunda pernikahan. Gerakan untuk mempertahankan nama keluarga perempuan setelah menikah (*fufubessei*) semakin menguat, menyoroti kerugian bagi perempuan dalam karier dan identitas pribadi. Modernisasi juga mengubah pandangan tentang pernikahan itu sendiri, dengan meningkatnya fenomena wanita karier (*bankonka*) dan individu yang memilih tidak menikah (*hikonka*), yang berkontribusi pada penurunan angka kelahiran (*shoshika*). Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari struktur keluarga besar tradisional ke keluarga inti yang lebih kecil. Meskipun demikian, budaya tradisional masih memiliki pengaruh kuat, dan praktik seperti omiai tetap ada dengan adaptasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adat Pernikahan di Jepang pada Zaman Edo. (n.d.). <https://www.kibin.com/essay-examples/wedding-customs-of-the-japanese-edo-period-bb6k2Ap6>
- Azhar. 2005. Status Anak dan Hukum Waris di Masyarakat Jepang. Simbur Cahaya.

- Karl Jakob Krogness. 2014. Jus Koseki: Household registration and Japanese citizenship 戸籍主義 戸籍と日本国籍". *The Asia-Pacific Journal* Vol. 12 No. 1.
- Lie dan John. 2003. The Legacy of Colonialism and the Koseki System in Japan. *Social Science Japan Journal*. Vol. 6. No. 1.
- Mitalika, Mita. 2014. Skripsi. Dominasi Patriarki Terhadap Tokoh Perempuan di Jepang. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mulyadi, Budi. 2018. Fenomena Penurunan Angka Pernikahan dan Perkembangan Budaya Oiai di Jepang. *Ejournal Kiryoku*. Vol. 2 No. 2.
- Ramadhanty, Desty, Helen Susanti, dan Paramita Winny Hapsari. 2023. Feminisme Liberal Dalam Gerakan Perubahan Sistem Nama Keluarga Berbeda Bagi Pasangan Menikah Di Jepang. *Idea Sastra Jepang*. Vol. 5 No. 1.
- Tanuki Stories From Japan. (n.d.). Travel Japan on Guided Tours: Nara, Kyoto & Osaka Explore Japan with Tanuki Stories. <https://www.tanukistories.jp/post/exploring-japanese-marriage-and-weddings-a-journey-through-tradition-and-modernity>
- The Law Office Of Jeremy D. Morley. (n.d.). Family Registration Law of Japan. https://www.international-divorce.com/family_reg_law.htm
- Widayanti, Dewi. 2021. Sistem IE Terkait Pewaris pada Keluarga Tradisional Jepang. *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang*. Vol. 7 No. 1.